

## STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA HALAL DI INDONESIA

**Alya Nabila Fitriana, Mazro'atus Sa'adah**

UIN Sunan Ampel Surabaya

E-Mail: alyanabilaa7@gmail.com,

E-Mail: mazroatus.saadah@uinsa.ac.id

### **ABSTRACT**

*Tourism is one of the sectors that is resistant to economic crises. Tourism can be a mainstay sector for the government as a catalyst for national economic growth that provides great benefits to the country. This study aims to determine the strategies that must be implemented in facilitating the implementation of halal tourism in Indonesia. This study uses a qualitative method with a literature study that focuses on the strategy of the Indonesian government in developing the potential of domestic halal tourism destinations. The results of searches from various sources that have been written in this study are that Indonesia has enormous potential in developing the halal tourism industry. The role of stakeholders and also the government, both regional and central, is very much needed in this regard. The government is one of the parties that plays an important role in developing the potential of domestic halal tourism. Tourism activities cannot be separated from the role of the government where the government acts as a planner to a policy maker related to halal tourism. The existence of clear policies and regulations will facilitate the process of implementing halal tourism in Indonesia so that it will have a positive impact on the community's economy and can help increase the country's foreign exchange. With the active role of stakeholders and also the involvement of the government, it is hoped that the halal tourism industry can be developed properly so that it can improve the economic sector of the country of Indonesia.*

*Keywords: Halal Tourism, Halal Industry, Government Strategy.*

### **ABSTRAK**

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang tahan terhadap adanya krisis ekonomi. Pariwisata dapat menjadi sektor andalan bagi pemerintah sebagai katalis pertumbuhan perekonomian nasional yang memberikan keuntungan besar bagi negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang harus diterapkan dalam memperlancar penyelenggaraan pariwisata halal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur yang berfokus pada strategi pemerintah Indonesia dalam mengembangkan potensi destinasi wisata halal dalam negeri. Hasil penelusuran dari berbagai sumber yang telah dituliskan pada penelitian ini yaitu Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam mengembangkan industri pariwisata halal. Peran dari para *stakeholder* dan juga pemerintah baik daerah maupun pusat sangat diperlukan dalam hal tersebut. Pemerintah merupakan salah satu pihak yang berperan penting dalam pengembangan potensi pariwisata halal dalam negeri. Kegiatan pariwisata

tidak bisa terlepas dari adanya peran pemerintah di mana pemerintah berperan sebagai perencana hingga pembuat kebijakan terkait pariwisata halal. Adanya kebijakan dan regulasi yang jelas akan mempermudah proses penyelenggaraan pariwisata halal di Indonesia sehingga akan berdampak positif bagi perekonomian masyarakat dan dapat membantu meningkatkan devisa negara. Dengan adanya peran aktif dari para pemangku kepentingan dan juga keterlibatan dari pemerintah, diharapkan dapat mengembangkan industri pariwisata halal dengan baik sehingga dapat meningkatkan sektor perekonomian negara Indonesia.

Kata Kunci: Pariwisata Halal, Industri Halal, Strategi Pemerintah.

## PENDAHULUAN

Jutaan orang mengeluarkan banyak uang bahkan hingga triliunan dollar Amerika hanya untuk membahagiakan diri dan menghabiskan waktu luang hingga rela meninggalkan rumah dan pekerjaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pariwisata merupakan bagian penting dari kehidupan manusia pada negara-negara maju. Sektor pariwisata akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang menjadi fenomena global sebagaimana dapat kita amati dari berbagai media, hal tersebut terjadi seiring dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (Ramadhani, 2021: 68-69).

Salah satu sektor yang tahan terhadap krisis ekonomi yaitu pariwisata. Hal tersebut terlihat pada masa krisis moneter di Indonesia tahun 1998 dimana transaksi pada sektor pariwisata dianggap dapat menggerakkan perekonomian bahkan hingga unit terkecil. Sektor pariwisata tahan banting terhadap krisis global terlihat pada saat naiknya nilai tukar dollar sektor ini tetap mengalami pertumbuhan. Sektor tersebut mengeluarkan biaya yang sedikit jika dibandingkan dari pendapatan, promosi yang tidak memerlukan terlalu banyak biaya, dan menjadi tren atau gaya hidup baru (Hanifah, 2020: 52).

Banyak wisatawan manca negara memilih Indonesia sebagai destinasi utama karena terdapat banyak faktor seperti transportasi yang bagus, kedekatan geografis, keindahan alam yang memukau, keramahan penduduk lokal, keberagaman budaya, dan banyak aspek menarik lainnya. Data tersebut dapat berubah seiring berkembangnya tren pariwisata dari waktu ke waktu karena sektor pariwisata selalu beradaptasi dengan perubahan yang berlaku (Soleha, 2023: 136). Menurut Global Islamic Economy Report, di akhir tahun 2023 industri makanan halal akan bernilai sebesar 1,8 triliun dollar, industri mode halal bernilai sebesar 361 miliar dollar, dan industri pariwisata halal akan bernilai 274 miliar dollar. Tentunya potensi tersebut harus didukung melalui pemanfaatan teknologi yang baik, digitalisasi secara global, regulasi yang tepat, dukungan dari lembaga keuangan syariah, konvergensi internasional sehingga dapat mengakselerasi peluang berkembangnya industri halal tersebut (Saputri, 2020: 25).

Di tahun 2018, Indonesia telah naik ke peringkat 10 global sebagai pelaku ekonomi syariah. Kenaikan tersebut didukung oleh peringkat kinerja Indonesia dalam mendorong industri halal food. Pemerintah menyusun model bisnis halal value chain

bersama Bank Indonesia dimana Bank Indonesia tidak hanya mendorong terjalannya local value chain dengan pengembangan usaha syariah lokal, namun juga hubungannya dengan luar negeri yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah ekspor dan menghadirkan alternatif produk untuk substitusi impor (Saputri, 2020: 25). Menurut laporan dari BI, menyatakan bahwa sektor wisata halal di Indonesia telah mendukung pengembangan ekonomi syariah. Dengan demikian terlihat jelas bahwa negara Indonesia akan sangat berpeluang besar dalam mengembangkan sektor tersebut sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa potensi wisata halal di Indonesia tidak akan berdampak besar apabila tidak dikelola dengan baik dan benar (Reza, 2020: 108).

Pariwisata dapat menjadi sektor andalan bagi pemerintah sebagai katalis pertumbuhan perekonomian nasional, pariwisata merupakan salah satu sektor yang memberikan keuntungan dengan cepat tanpa modal yang terlalu banyak. UU No. 10 Tahun 2009 menjadi pedoman bagi para pelaku sektor pariwisata. Sektor pariwisata terutama dari wisatawan mancanegara dapat menjadi pemasok devisa bagi negara (Reza, 2020: 106). Indonesia menempati urutan ke-empat dari segi jumlah pengunjung pada negara ASEAN yang mencapai 15,8 juta pada tahun 2018. Meskipun hanya menempati urutan ke-empat, sudah seharusnya mengapresiasi Kementerian Pariwisata selaku pihak terkait dimana jumlah kunjungan mengalami kenaikan sebesar 12,58 % dari tahun sebelumnya (Reza, 2020: 108).

Pariwisata halal di negara Indonesia telah dikembangkan menjadi program nasional melalui Kementerian Pariwisata. Kementerian Pariwisata dalam mengembangkan pariwisata halal telah menetapkan lima belas provinsi yang diberikan otonomi untuk mengelola potensi wisata di tiap daerah masing-masing, lima belas provinsi tersebut menjadi fokus pengembangan destinasi wisata halal terkemuka. Dengan memberikan otonomi tersebut, diharapkan masing-masing provinsi yang telah ditetapkan dapat mengembangkan potensi wisata di daerah masing-masing sehingga dapat menjadi destinasi wisata yang unggul dan menjadi tujuan favorit para wisatawan (Ramadhani, 2021: 69). Pemerintah Indonesia berperan penting dalam meningkatkan potensi industri halal dalam negeri. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi serta kebijakan dalam memfasilitasi industri halal (Herianti et al., 2023: 57).

Pengembangan pariwisata halal harus didukung oleh banyak pihak sehingga dibutuhkan kerja sama dalam mendorong sektor tersebut, termasuk dalam hal finansial dan pembiayaan. Dengan berkembangnya pariwisata halal, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat dan negara akan mendapat pemasukan berupa devisa sehingga pertumbuhan ekonomi negara dan masyarakat akan semakin meningkat. Pemerintah dan masyarakat harus saling berpartisipasi dalam pengembangan sektor tersebut. Selain itu, teknologi juga berperan penting dalam

memajukan sektor pariwisata halal khususnya dalam hal promosi dan transaksi online yang dapat mempermudah para wisatawan mengakses berbagai hal dan informasi yang dibutuhkan (Reza, 2020: 110).

Dari pemaparan latar belakang di atas, terlihat bahwa negara Indonesia memiliki peluang yang begitu besar dalam sektor pariwisata halal. Maka penelitian ini akan membahas mengenai strategi dalam mengembangkan potensi pariwisata halal di Indonesia sehingga dapat menarik minat wisatawan khususnya bagi para wisatawan muslim baik domestik maupun manca negara.

## KAJIAN PUSTAKA

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas terkait strategi dan potensi penerapan pariwisata halal di Indonesia dalam berbagai artikel online yang telah dipublikasikan, yaitu sebagai berikut:

1. Studi yang dilakukan oleh Bonaraja Purba dkk yang berjudul "Potensi Sumber Daya Alam dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata di Indonesia". Berdasarkan penelitian tersebut, Indonesia mempunyai kekayaan beragam dan melimpah dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Agar pariwisata halal di Indonesia dapat diselenggarakan dengan baik, maka diperlukan pentingnya investasi pada infrastruktur, promosi yang tepat, dan perlindungan lingkungan yang ketat.
2. Studi yang dilakukan oleh Elpa Hermawan yang berjudul "Strategi Kementerian Pariwisata Indonesia dalam Meningkatkan *Branding* Wisata Halal". Penelitian dilakukan untuk menganalisis strategi yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata Indonesia dalam meningkatkan kualitas wisata halal kelas dunia, yaitu menyediakan fasilitas yang sesuai dengan standar, promosi yang tepat, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
3. Studi yang dilakukan oleh Veni Reza yang berjudul "Pariwisata Halal dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia". Hasil penelitian menyatakan bahwa Indonesia gencar mempromosikan tren wisata halal untuk menarik minat para wisatawan dari berbagai negara.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia berpotensi besar dalam sektor wisata halal sehingga dalam mengembangkan potensi tersebut dibutuhkan strategi yang baik seperti pembangunan infrastruktur, promosi yang tepat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan perlindungan terhadap lingkungan. Adapun penelitian ini mengusulkan pendekatan baru yaitu dengan mengintegrasikan pengelolaan berbasis komunitas, potensi lokal, dan standar syariah yang ketat di mana hal tersebut sejalan dengan keunggulan Negara Indonesia sebagai

sebuah negara yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang khas dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di Dunia.

### **Pariwisata Halal**

Pariwisata halal adalah sebuah aktivitas, pengalaman, kegiatan atau kegemaran yang dilakukan dalam perjalanan wisata yang sesuai dengan kerangka Islam. Pariwisata halal tidak terbatas pada wisata religi, akan tetapi semua aktivitas pariwisata yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai islami. Pariwisata halal juga dapat diartikan sebagai wisata yang tetap memperhatikan ibadah dan dakwah, wisatawan berwisata dengan tetap menjalankan ibadah wajib yaitu sholat 5 waktu dan menjauhkan diri dari hal yang dilarang oleh-Nya (Hanifah, 2020: 56).

Pada dasarnya, pariwisata halal merupakan bentuk pariwisata religius yang memperhatikan aturan agama Islam, yang di dalamnya menawarkan atau menyediakan produk serta layanan halal yang cocok untuk wisata khususnya bagi wisatawan muslim. Pariwisata halal memberikan alternatif kepada kaum muslim karena hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan hukum syariah telah diperhatikan atau dipelihara. Hal tersebut dapat memberikan ketenangan bagi wisatawan beragama Islam saat melakukan perjalanan, dimana wisatawan dapat menemukan layanan ataupun produk yang halal sehingga dapat menghindari hal-hal yang dilarang oleh syariat ajaran agama Islam (Millatina et al., 2019: 100).

Kegiatan pariwisata halal didukung oleh berbagai layanan atau fasilitas yang disediakan baik oleh masyarakat, pengusaha, maupun pemerintah untuk memenuhi ketentuan syariah. Wisata halal memiliki karakteristik yang universal sehingga digemari banyak pihak. Wisata halal mengutamakan kegiatan tadabur alam dengan tetap memperhatikan tujuan utama dari kegiatan itu sendiri yaitu memperoleh hiburan. Konsep wisata ini menyediakan fasilitas pendukung lengkap bagi wisatawan agar dapat melakukan ibadah disamping melakukan perjalanan wisata (Saputri, 2020: 29-30).

Pariwisata halal merupakan sebuah proses implementasi nilai-nilai syariah ke dalam aktivitas wisata. Pada dasarnya, konsep pariwisata halal meliputi semua aktivitas yang berkaitan dengan penginapan, makanan dan minuman, transportasi, sistem keuangan, dan fasilitas yang menyediakan jasa yang baik dan tepat. Beberapa prinsip pengembangan pariwisata halal, di antaranya:

1. Pengembangan fasilitas lebih diutamakan dekat dengan destinasi wisata.
2. Fasilitas dan juga pelayanan yang disediakan hendaknya dimiliki oleh masyarakat lokal sekitar tempat destinasi wisata halal tersebut.
3. Pembangunan wisata harus berlandaskan nilai kearifan lokal budaya setempat yang berlaku dan juga nilai-nilai luhur (Pranandari et al., 2023: 6).

Pengalaman wisata halal bukan hanya sekedar layanan fisik, namun juga mencakup interaksi yang menghormati aturan-aturan sosial dan etika Islam. Hal

tersebut mencakup pengembangan aktivitas yang mempromosikan kebersamaan dan juga pengertian antara budaya yang berbeda-beda. Pariwisata halal juga membangun kerjasama dan pemahaman antara komunitas muslim dan non muslim dengan memahami keragaman dan pertukaran budaya yang positif. Dengan demikian, definisi dari pariwisata halal yaitu merupakan sebuah upaya dalam menciptakan pengalaman perjalanan atau berwisata yang berlandaskan nilai-nilai islami. Dalam konteks ekonomi, pariwisata halal tidak hanya berpengaruh pada industri pariwisata saja, namun juga berdampak terhadap ekonomi lokal dan global, memperluas lapangan kerja, dan promosi budaya serta dialog antarbudaya (Al Mustaqim, 2023: 30).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur melalui pengumpulan dan analisis berbagai sumber yang relevan seperti artikel ilmiah, laporan penelitian, dan sumber-sumber yang lain. Penelitian kualitatif merupakan sebuah proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena sosial dengan menciptakan gambaran yang kompleks (Fadli, 2021: 35). Penelitian ini akan mengkaji bagaimana langkah-langkah atau strategi yang harus diterapkan khususnya bagi pemerintah Indonesia dalam mengembangkan potensi wisata lokal berbasis syariah.

## **PEMBAHASAN**

### **Pariwisata Halal di Indonesia**

Indonesia jika dibandingkan dengan negara Islam lain seperti Malaysia dan Turki, tergolong masih lambat dalam beradaptasi dengan pasar wisata global dengan konsep syariah atau halal. Namun di sisi lain, Indonesia sebenarnya berpotensi lebih besar daripada kedua negara tersebut (Sukirman, 2022: 42). Dengan mayoritas penduduk beragama Islam, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan potensi besar dalam mengembangkan pariwisata halal. Selain itu, budaya yang sangat beragam juga menjadi ciri khas dari negara Indonesia yang dapat menarik minat wisatawan hingga manca negara. Pulau Sumatera didominasi oleh budaya melayu dengan nuansa religinya serta memiliki berbagai peninggalan bersejarah. Selain itu, budaya religi juga terdapat di banyak wilayah Pulau Jawa seperti Cirebon, Yogyakarta, Banten, dan Jawa Timur. Begitu juga dengan kuliner khas dari berbagai wilayah di Indonesia yang cocok untuk dinikmati para wisatawan dan elegan dijadikan sebagai oleh-oleh (Hanifah, 2020: 58).

Adanya peningkatan kunjungan dari wisatawan muslim merupakan salah satu pasar yang diharapkan setiap tahunnya. Pariwisata berdampak positif bagi perekonomian global sebagaimana dinyatakan dalam laporan dari Komite Pariwisata dan Pariwisata. Kunjungan wisatawan asing pada tahun 2017-2018 mengalami kenaikan. Menurut Badan Pusat Statistik, kunjungan wisatawan asing mencapai 15,81

juta di mana mengalami peningkatan sebesar 12,58%. Dari sektor tersebut devisa juga mengalami peningkatan sebesar 11,8% (Noor et al., 2024: 8).

Industri halal telah menjadi salah satu instrumen diplomasi ekonomi negara Indonesia. Kedatangan Raja Salman memberikan pengaruh baik yang dapat menarik pasar Timur Tengah. Terlebih beliau memperpanjang liburannya saat berada di Indonesia. Raja Salman tidak hanya sekedar menyepakati beberapa kerjasama, namun juga menikmati destinasi pariwisata di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga menyasar pasar Mediterania Timur. Pada acara *Gala Dinner Indoleveant Travel Mart* tahun 2019, Arief Yahya selaku Menteri Pariwisata Indonesia kala itu mengundang wisatawan Mediterania Timur agar berkunjung ke Indonesia melalui program *Tourism Hub* (Subarkah et al., 2020: 93-94).

Meskipun Indonesia berpeluang besar dalam menyelenggarakan industri pariwisata halal, namun juga terdapat banyak tantangan yang harus diperhatikan terutama oleh para *stakeholder* dan pemerintah. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam terbanyak di dunia, sudah sepatutnya dapat menjadi pemimpin negara dalam bidang industri halal, akan tetapi kenyataan tidak semudah yang dibayangkan (Herianti et al., 2023: 61).

### **Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata Halal di Indonesia**

Penilaian kesiapan penyelenggaraan pariwisata halal dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu sebagai berikut:

1. Produk yang dikembangkan harus sesuai dengan kriteria umum dan standarisasi yang ditetapkan. Kehalalan prosuk pada destinasi wisata harus diperhatikan. Selain itu, inovasi sangat diperlukan dalam rangka menjamin mutu dan kualitas produk halal. Kuliner khas daerah dapat menjadi salah satu produk dalam pengembangan pariwisata halal. Oleh sebab itu, standarisasi produk kuliner unggulan diperlukan supaya cita rasa kuliner tetap terjaga. Selain kuliner, penginapan atau hotel juga perlu diperhatikan. Hotel tidak saja menyediakan tempat ibadah dan restoran halal, namun juga dapat melindungi pengunjung dari hal-hal yang kurang baik sehingga hotel tersebut tidak hanya menarik minat para wisatawan muslim saja, tapi juga dapat menarik minat wisatawan non muslim karena hotel tersebut mementingkan nilai-nilai kemanusiaan. Aplikasi *tracking* mengenai pariwisata halal perlu dikembangkan karena informasi penting terkait hotel, restoran, dan produk unggulan lokal dapat mudak diakses para wisatawan. Selain itu, informasi mengenai objek wisata, iklim, dan cuaca juga diperlukan sehingga wisatawan dapat memperkirakan anggaran dan waktu yang tepat untuk berwisata.
2. Lembaga dan SDM yang mendukung pengembangan pariwisata halal yang kompeten sehingga harus ditunjang dengan pendidikan dan *training* yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan khususnya yang beragama Islam.

3. Pengelola pariwisata harus mampu dalam membidik target sasaran, menyajikan paket-paket wisata, mengemas, dan mempromosikan destinasi wisata sehingga mampu menarik minat banyak wisatawan. Promosi paling ampuh yaitu "dari mulut ke mulut", hal tersebut karena promosi tersebut tidak membutuhkan terlalu banyak biaya dan juga efektif untuk mendatangkan wisatawan yang melibatkan kepercayaan dan interaksi dari orang yang pernah mengunjungi destinasi yang dikembangkan tersebut (Hanifah, 2020: 65-66).

Pemerintah merupakan salah satu pihak yang berperan penting dalam pengembangan potensi pariwisata halal dalam negeri. Kegiatan pariwisata tidak bisa terlepas dari adanya peran pemerintah daerah maupun pusat. Oleh sebab itu, pemerintah mempunyai peran yaitu sebagai berikut:

#### 1. Perencanaan pariwisata

Perencanaan yang sangat matang diperlukan untuk mencapai tujuan sehingga dapat memaksimalkan dampak positif dan meminimalisir dampak negatif yang diakibatkan dari adanya pengembangan sektor pariwisata halal tersebut. Akibat perencanaan yang tidak tepat dapat menimbulkan berbagai macam konflik dan permasalahan di antara para pemangku kepentingan. Tiap-tiap daerah memiliki karakteristik permasalahan yang berbeda sehingga memerlukan perencanaan yang berbeda pula.

#### 2. Pembangunan pariwisata

Pemerintah dapat berkontribusi dalam hal ini melalui penyediaan berbagai fasilitas yang diperlukann seperti infrastruktur jalan, air, listrik, bandara, tempat pembuanagn limbah, dan berbagai infrastruktur umum lain yang dibutuhkan dalam menunjang penyelenggaraan pariwisata halal.

#### 3. Kebijakan pariwisata

Kebijakan merupakan perencanaan jangka panjang diperlukan yang terdiri atas tujuan dibangunnya destinasi wisata beserta prosedur atau cara yang harus digunakan dalam meraih tujuan tersebut dalam bentuk pernyataan yang bersifat formal seperti hukum beserta dokumen-dokumen resmi lainnya. Pada umumnya, kebijakan yang dibuat dimasukkan dalam kebijakan ekonomi yang secara keseluruhan berisi struktur dan pertumbuhan perekonomian jangka panjang.

#### 4. Peraturan pariwisata

Peraturan bersifat penting sehingga dengan adanya peraturan tersebut para wisatawan akan mendapatkan perlindungan sehingga terciptanya rasa aman dan nyaman (Millatina et al., 2019: 104-105).

RPJMN tahun 2019-2024 dan MEKSI (Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia) menyebutkan bahwa pengembangan industri produk halal masuk ke dalam upaya pemerintah dalam meningkatkan kinerja industri nasional. Adapun fokus utama pengembangan industri produk halal tahun 2019-2024 yaitu:

- Pembentukan infrastruktur dan kluster industri halal sebagai bagian penting dalam perekonomian nasional.
- Pengembangan sistem asuransi halal harus bersifat komprehensif sehingga dapat mendukung pertumbuhan produk halal di seluruh negeri.
- Peningkatan industri halal di bidang penting dalam neraca pembangunan nasional (Herianti et al., 2023: 62).

Majelis Ulama Indonesia telah mengatur keseluruhan mengenai kegiatan pariwisata halal dengan mengeluarkan Fatwa 08/DSN-MUI/X/2016 dari mulai ketentuan akad, hotel, destinasi, spa, sauna, massage, biro perjalanan, dan *tour guide* (Mahardika, 2020: 76). Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia sedang gencar melaksanakan sertifikasi halal, terutama dalam sektor pariwisata halal. Adapun proses sertifikasi tersebut meliputi berbagai aspek seperti penginapan, rumah makan, hingga objek wisata dalam rangka memberikan keyakinan dan kepastian bagi para wisatawan muslim yang berkunjung bahwa mereka akan menerima fasilitas atau layanan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, pelaku industri tersebut juga harus menjalani pelatihan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka dalam menerapkan nilai-nilai syariah pada saat memberikan pelayanan (Soleha, 2023: 141).

Bapennas merencanakan pembangunan sektor pariwisata yaitu konsisten terhadap arah pembangunan hingga tahun 2025 berupa pengembangan sehingga dapat meningkatkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, menjaga *image* negara, dan memperluas lapangan pekerjaan (Millatina et al., 2019: 102).

## KESIMPULAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang tahan akan terjadinya krisis perekonomian. Pariwisata dapat menjadi sektor andalan bagi pemerintah sebagai katalis pertumbuhan perekonomian nasional, pariwisata merupakan salah satu sektor yang memberikan keuntungan dengan cepat tanpa modal yang terlalu banyak. Dengan mayoritas penduduk beragama Islam menjadikan Indonesia berpeluang besar dalam mengembangkan industri pariwisata halal. Pariwisata halal merupakan sebuah upaya dalam menciptakan pengalaman perjalanan atau berwisata yang berlandaskan nilai-nilai islami. Dalam konteks ekonomi, pariwisata halal tidak hanya berpengaruh pada industri pariwisata saja, namun juga berdampak terhadap ekonomi lokal dan global, memperluas lapangan kerja, dan promosi budaya serta dialog antarbudaya. Peran dari para *stakeholder* dan pemerintah sangat diperlukan dalam mendukung proses pengembangan sektor pariwisata halal tersebut. Pemerintah berperan sebagai perencana hingga pembuat kebijakan dalam hal ini. Selain itu, kualitas SDM yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pariwisata halal juga perlu ditingkatkan, sehingga harus ditunjang dengan pendidikan dan *training* yang sesuai dengan kebutuhan

wisatawan. Dengan adanya peran aktif dari para pemangku kepentingan dan juga keterlibatan dari pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan industri pariwisata halal sehingga dapat meningkatkan perekonomian, baik bagi negara maupun bagi masyarakat Indonesia itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Mustaqim, D. (2023). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syariah. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(1).
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1).
- Hanifah, R. D. (2020). Ppotensi Halal Tourism di Indonesia. *Jurnal Hospitality dan Pariwisata*, 1(2).
- Herianti, H dkk. (2022). Industri Halal Fashion Dari Perspektif Dan Perkembangannya di Indonesia. *Indonesia Journal of Halal*, 6(2).
- Hermawan, Elpa. (2019). Strategi Kementerian Pariwisata Indonesia dalam Meningkatkan Branding Wisata Halal. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 7(2).
- Mahardika, R. (2020). Strategi Pemasaran Wisata Halal. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3(1).
- Millatina dkk. (2019). Peran Pemerintah Untuk Menumbuhkan Potensi Pembangunan Pariwisata Halal di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 5(1).
- Noor, L. S dkk. (2024). Perkembangan Wisata Halal Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnail Ilmiah Edunomika*, 8(2).
- Pranandari, R. P dkk. (2023). Perkembangan Pariwisata Halal di Indonesia. *Muamalah*, 9(1).
- Purba, B., Situmorang, E. A. A., Firmansyah, D., & Manurung, T. A. (2024). Potensi Sumber Daya Alam dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata di Indonesia. *Economic Reviews Journal*, 3(3).
- Ramadhani, M. (2021). Dilema Regulasi Pariwisata Halal Di Indonesia. *Ar Rehla: Jurnal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Travelling, and Creative Economy*, 1(1).
- Reza, V. (2020). Pariwisata Halal Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *Jurnal An-Nahl*, 7(2).
- Saputri, O. B. (2020). Pemetaan Potensi Indonesia sebagai Pusat Industri Halal Dunia. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(2).
- Soleha, S. (2023). Potensi Pariwisata Halal Indonesia dalam Menarik Wisatawan Interasional. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Travelling, and Creative Economy*, 3(2).

- Subarkah, A. R., & Rachman, J. B. (2020). *Destination Branding* Indonesia sebagai Destinasi Wisata Halal. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas Dan Perjalanan*, 4(2).
- Sukirman, D., & Zulkarnaen, W. (2022). Manajemen Pariwisata Hhalal Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 3(1).